

## ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap pelaku tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis . Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Clinical Legal Research. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto. Materi penelitian Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : penerapan unsur-unsur Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan alternatif primer ke-1 terhadap pelaku tindak pidana membelanjakan rupiah palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt adalah telah sesuai, karena unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh terdakwa. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt : Pertimbangan juridis dan Pertimbangan sosiologis

Kata kunci : Tindak Pidana, Membelanjakan, Rupiah Palsu

### ABSTRACT

*The aim of the study was to find out the application of the elements of Article 36 paragraph (3) of Law Number 7 of 2011 Concerning Currency against the perpetrators of the crime of Spending Counterfeit Rupiah in Decision Number 45/Pid.B/2022/PN Pwt. To find out the legal considerations of judges in imposing criminal penalties on perpetrators of the crime of spending counterfeit rupiah in Decision Number 45/Pid.B/2022/PN Pwt. The method used is the juridical approach method. The research specification used is Clinical Legal Research. The research location is in the Purwokerto District Court. Research material Purwokerto District Court Decision Number 45/Pid.B/2022/PN Pwt. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: application of the elements of Article 36 paragraph (3) of Law Number 7 of 2011 Concerning Currency as the 1st primary alternative indictment against the perpetrators of the crime of spending counterfeit rupiah in Decision Number 45/Pid .B/2022/PN Pwt is appropriate, because the elements have been fulfilled by the defendant. Judge's Legal Considerations in imposing a crime on the perpetrators of the crime of Spending Counterfeit Rupiah in Decision Number 45/Pid.B/2022/PN Pwt: Juridical Considerations and Sociological Considerations*

*Keywords: Crime, Spending, Counterfeit Rupiah*